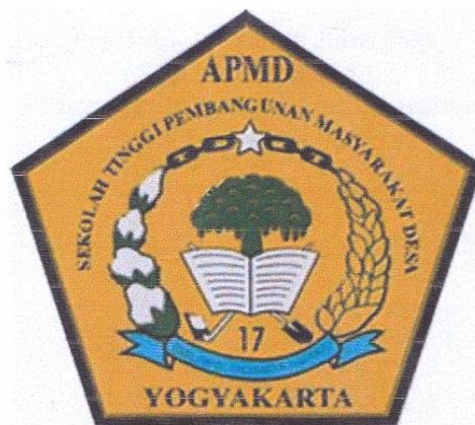


SKRIPSI

**PERBUATAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TERNAK**

*(Penelitian Di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*



Disusun Oleh :

VIDIA ANDINA

18520179

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



i

**PERBUATAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TERNAK DI KALURAHAN BATURETNO, KAPANEWON
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Diajukan Memenuhi Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (SI)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

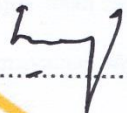


2022

HALAMAN PENGESAHAN

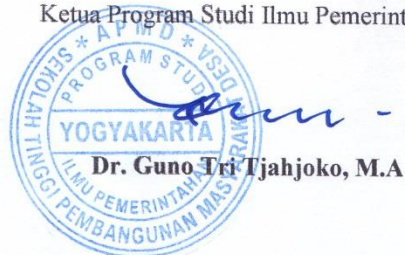
Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 28 April 2022
Jam : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P</u> Penjuji Samaping I	

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vidia Andina

NIM : 18520179

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Ternak Di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 April 2022

Penulis



Vidia Andina

18520179

MOTTO

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya."

(1 Korintus 10:13)

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(Yeremia 29:11)

"Tidak apa-apa mengeluh asal jangan menyerah tidak ada sejarah anak perempuan bapak dan mama gampang menyerah."

(Vidia Andina)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada saya selama ini terutama selama saya membuat dan menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya (bapak Adrianus Konus dan Ibu Noberti Toma) yang telah membesarkan dan mendidik saya selama ini. Terimakasih atas dukungan serta motivasi yang selalui diberikan kepada saya. Menyelesaikan kuliah ini adalah pencapaian besar saya selama hidup, dan saya persembahkan kelulusan S1 ini kepada bapak dan mama yang selalu mendukung baik itu melalui doa, motivasi, serta keuangan yang diberikan kepada saya.
2. Terimakasih untuk kakak Rosa, abang Eko, kakak Yolanda, adek Nina, abang Ebi, Serta abang Riki, selaku saudara yang selalu memberi saya semangat dan motivasi, serta mau mendengar keluh kesah saya selama kuliah sampai selesai ini. Maaf kalau saya selama ini merepotkan kalian. Salam sayang dari saya untuk kalian.
3. Terimakasih kepada Ibu Endah Safitri selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia dan dengan sabar telah membimbing saya selama mengerjakan skripsi.
4. Skripsi ini kupersembahkan juga kepada orang istimewa Felix Nola Sigit Purnomo yang selama beberapa tahun ini menemankan dan memberikan dukungan, serta kebaikanmu.

5. Terimakasih untuk teman-teman yang ada selama saya kuliah dan menemankan saya selama saya menyelesaikan skripsi ini. Untuk Nur, Tesa, Ega, Tri, ina, Anisa, dan Putri, terimakasih atas kebaikan dan support kalian selama saya kuliah di jogja.
6. Terimakasih untuk teman-teman Kelompok Studi Tentang Kesa (KESA) yang selama ini menjadi tempat kedua untuk menambah ilmu selama saya kuliah di jogja.
7. Terimakasih kepada para dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan Akademik selama kami menempuh studi di kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Ternak. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahioke, MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Safitri Endah Winarti, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis dengan teliti dan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar sampai selesai.
4. Bapak Firdaus, selaku dosen pengganti sementara yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suharyanto, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membntu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh studi di STPMD “APMD”.

6. Bapak Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang selama ini memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis khususnya Bapak Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Baturetno, Kapanewon, Kabupaten Bantul, DIY yang telah memberikan tempat, ruang, waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Kedua orang tua bapak Adrianus Konus dan Ibu Noberti Toma yang selama ini selalu mendukung, doa dan memberi motivasi kepada saya selama saya kuliah.
10. Untuk teman-teman ditanah rantau Sigit, Nur, Tesa, Ega, Tri, Ina, Anisa, dan Putri, terimakasih sudah mau menjadi teman sekaligus keluarga selama di tanah rantau ini. Saya harap kita semua sukses dengan jalan yang kita pilih suatu saat nanti.
11. Untuk teman-teman Kelompok Studi Tentang Desa (KESA) yang menjadi tempat kedua bagi saya untuk menambah ilmu dan pengetahuan selama saya kuliah di Jogja.
12. Masih banyak pihak-pihak sangat berjasa bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Namun penulis tetap mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Governing.....	8
2. Pemerintah Desa.....	11
a. Desa.....	11

b. Kewenangan Desa.....	12
c. Pemerintah Desa.....	13
3. Empowerment (Pemberdayaan).....	15
4. Kelompok Ternak.....	16
F. Ruang Lingkup.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Unit Analisis	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
a. Observasi.....	19
b. Wawancara.....	20
c. Dokumentasi	20
d. Triangulasi.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
a. Pengumpulan Data	21
b. Reduksi Data	21
c. Penyajian Data	22
d. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II PROFIL KALURAHAN BATURETNO	23
A. Sejarah Kalurahan Baturetno	23
B. Wilayah Geografis Kalurahan.....	24
C. Kondisi Demografis	25
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	26
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	26

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	27
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
D. Kondisi Sosial	28
1. Sarana dan Prasarana.....	28
a. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	28
b. Sarana dan Prasarana Kesehatan	28
c. Sarana Ibadah	29
d. Sarana Umum.....	29
e. Sarana Perhubungan.....	30
2. Data Aparat Pemerintahan Kalurahan.....	31
3. Data Pengurus Kelompok Ternak	31
E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	32
 BAB III ANALISIS DATA	 40
A. Proses Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Pengelolaan Kelompok Ternak.....	 40
B. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Pengelolaan Kelompok Ternak.....	 44
1. Sosialisasi.....	44
2. Proses Pemberdayaan.....	46
3. Monitoring dan Evaluasi	48
C. Hasil Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Pengelolaan Kelompok Ternak.....	 49
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 57

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka	60
Lampiran Foto Bersama Informan	62
Panduan Wawancara (Interview Guide)	67
Lampiran Surat Penunjuk Dosen	69
Lampiran Surat Permohonan Ijin Penelitian	70
Lampiran Surat Tugas	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Penelitian	19
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Usia.....	26
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	27
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
Tabel 2.5 Kondisi Sosial	28
Tabel 2.6 Prasarana Pendidikan	28
Tabel 2.7 Prasarana Kesehatan	29
Tabel 2.8 Prasarana Ibadah	29
Tabel 2.9 Prasarana Perhubungan	30
Tabel 2.10 Data Lurah dan Perangkat Kalurahan	31
Tabel 2.11 Data Pengurus Kelompok Ternak	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Baturetno.....	25
------------------------------------------	----

INTISARI

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya dengan basis daya mereka sendiri dengan mengoptimalkan daya dan meningkatkan posisi tawar yang dimiliki, baik dibantu maupun tanpa bantuan dari pihak luar. Melalui pemberdayaan masyarakat ini pemerintah desa dapat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 12 bahwa “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”. Kalurahan Baturetno melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kelompok ternak, pemberdayaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat Baturetno dengan mengelola kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Baturetno. Pemberdayaan ini pada awal pemberdayaannya berjalan dengan baik dan lancar melalui pengkapisasian, pembinaan, dan sosialisasi. Namun meskipun berhasil dalam pengelolaan ternaknya masih ada anggota kelompok ternak yang belum bisa mengembangkan ternaknya dengan baik hal ini terjadi karena adanya dua faktor yaitu masyarakat belum sepenuhnya mengerti dan memahami bagaimana caranya mengelola ternak dengan baik. Serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berternak di Baturetno.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan Triangulasi, serta informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Baturetno, pengurus kelompok ternak, anggota kelompok ternak, dan masyarakat. Pada tahap menganalisis data tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah Pemerintah desa pada tahap awal telah mampu memberdayakan kelompok ternak dengan kemampuannya untuk merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi istilah nya mengatur dan mengurus kelompok ternak, tetapi tidak berkelanjutan khususnya dalam bidang teknis atau bagaimana berternak yang baik, karena perangkat desa tidak ada yang ahli dibidang perternak, mestinya pemerintah desa bekerjasama dengan dinas perternakan dan perikanan kabupaten untuk mendampingi pasca fasilitasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait dengan “Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Ternak. *Governing* (perbuatan pemerintah) merupakan upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. (Sutoro Eko:2021).

Governing pemerintah desa adalah pemerintahan desa yang menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebagai pembanding penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kevin Kumaat, Johannis Kaawoan, dan Marlien Lopian di tahun 2018. Dengan judul penelitian “*Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Peternak Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder*”. Pada penelitian ini berbicara mengenai Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu dari M. Wahyu Nugroho, pada tahun 2017. Yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi Lembu Aji Di Dusun Pondok Kulon, Sleman Yogyakarta*”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang berbicara tentang masyarakat yang tergabung dalam

kelompok ternak sapi sangat membutuhkan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola kegiatan yang mereka lakukan.

Penelitian dari Muhammad Nasib, Shindy Karenina, Alif Laela, Rifky Amri Amrullah, Mohammad Safri Fauzi, dan Muhammad Iqbal, pada tahun 2020, dengan judul “*Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Ternak Ngudi Mulyo Panggang oleh PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu*”. Dalam penelitian ini berbicara mengenai CSR PT. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbicara tentang kurangnya pendampingan yang lebih mendalam terhadap pemberdayaan kelompok ternak.

Dari beberapa penelitian di atas akan menjadi pembanding bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun korelasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pemberdayaan masyarakat di dalam kelompok ternak belum berjalan dengan baik. Perbedaannya dari beberapa penelitian terdahulu adalah fokus dan lokus penelitian. Dan juga pada penelitian terdahulu belum meneliti tentang *governing* pemerintah desa. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Kewenangan Desa: *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Kelompok Ternak.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa tercantum dalam Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16).

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Kewenangan desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (12) adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 67 (2) bahwa desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 68 ayat 1. Masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi serta mengawasi dan menyampaikan keinginannya terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemberdayaan masyarakat desa di dalam pengelolaan kelompok ternak merupakan salah satu program yang tepat untuk memungkinkan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat, karena kelompok ternak ini suatu bentuk organisasi kerjasama yang membantu masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan kemampuan dan menjadi wadah untuk menyatukan para kelompok ternak secara *horizontal* maupun *vertical*.

Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupateh Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kalurahan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan di dalam pengelolaan kelompok ternak. Tujuan dari program pemberdayaan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Baturetno terutama untuk masyarakat miskin. Program pemberdayaan di dalam pengelolaan kelompok ternak yang dibentuk tahun 2009 ini dijalankan pemerintah kalurahan yang pada awal pemberdayaannya berjalan dengan baik dan lancar dengan membentuk kelompok dan memberikan bantuan kepada kelompok ternak berupa kandang, bibit ternak

dan modal uang tunai yang digunakan untuk memelihara ternak. Serta melakukan evaluasi dan pemantauan.

Namun kelompok ternak yang berada di Kalurahan Baturetno masih belum menjadi kelompok ternak yang berdaya karena anggota kelompoknya masih ada yang merasa belum di berdayakan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini. Karena pada kenyataannya setelah dibentuknya kelompok ternak dan bantuan sekali yang diberikan pada awal dibentuknya kelompok ternak dan juga evaluasi dan pemantauan yang dilakukan hanya selama 2 tahun membuat kelompok ternak yang ada di Kalurahan Baturetno ini tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Kalurahan sudah tidak lagi memperhatikan perkembangan kelompok ternak yang sedang berjalan. Sehingga yang terjadi masih adanya anggota kelompok ternak yang gagal dalam dalam memelihara atau mengelola ternak yang ada pada kelompok ternak tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah Kalurahan Baturetno dalam memberikan arahan-arahan kepada anggota kelompok ternak tentang bagaimana mereka harus memelihara atau mengelola ternak mereka dengan benar. Kelompok ternak yang ada di Kalurahan Baturetno ini sudah lama terbentuk kelompok ternak, tapi sepertinya tidak banyak program yang dilaksanakan didalamnya. Yang mana partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok ternak masih relatif rendah. Yang menjadi masalah utama juga dalam pengelolaan kelompok ternak di Kalurahan Baturetno ini adalah setiap kelompok ternak belum memiliki badan hukum yang menjadi pendukung bagi kelompok ternak untuk meminta bantuan dari pihak Kalurahan, Kabupaten, Provinsi maupun dari pusat. Sehingga sampai saat ini para anggota kelompok ternak hanya

mengandalkan tenaga dan modal sendiri untuk memelihara ternaknya. Akibatnya sekarang ini banyak anggota kelompok ternak yang memilih berhenti untuk berternak dikarena tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah kalurahan dan tidak adanya biaya untuk melanjutkan memelihara ternaknya. Serta tantangan yang sering dihadapi kelompok ternak adalah *empowerment* (pemberdayaan) dari kelompok ternak itu sendiri.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi, lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ternak menjadi salah satu pembangunan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa jika kelompok ternak di dukung pembinaan langsung dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah dapat berupa bantuan finansial dan *technical support* untuk meningkatkan kapasitas dari anggota kelompok ternak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Ternak”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok ternak di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok ternak di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

C. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, sebagai bahan kajian teoritis atau informasi dasar dalam perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok ternak.
2. Manfaat Praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah desa maupun masyarakat luas terkait perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok ternak. Dan dapat memberikan sebuah informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

D. Kerangka Konseptual

1. *Governing*

Perbuatan pemerintah disebut *governing* (G2). G2 adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep *ruling*, walau banyak ahli yang sering menyamakannya. Literatur pembeda ditulis oleh Steven A. Cook (2007) “*ruling but not governing*” (menguasai tetapi tidak memerintah. Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara *ruling* dengan *governing* berbeda, di mana *ruling* sendiri bisa dilakukan siapapun dan *ruling* mempunyai menguasai serta memiliki unsur dominasi. Secara ideal normatif, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. (Sutoro Eko:2021).

Governing diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Otoritas tersebut adalah tradisi atau pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yakni mengabaikan perbuatan politik. *Governing* memiliki padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan, di mana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi misalnya: konsep *ruling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep

ordering (menata atau menciptakan), dan konsep *steering* (mengarahkan). (Sutoro Eko :2021).

Para ilmuwan politik Para ilmuwan politik lebih menyukai *ruling* dari pada *governing*, misalnya Ilmuwan Amerika Serikat seperti Robert Dahl. Dahl sebagai ilmuwan politik tetapi kajiannya lebih dekat dengan politik dalam pengertian pemerintahan, yang pada tahun 1961 menulis “*Who Govern*” atau siapa yang memerintah. Dahl berbicara pada otoritas atau kewenangan politik yang sudah dilembagakan dalam institusi pemerintahan. William Domhoff (1967) lebih menyukai konsep *rule* yang dalam bukunya menulis “*Who Rule*” atau siapa yang menguasai. Ia memiliki perspektif keluar dari institusi pemerintahan, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kekuatan di luar institusi pemerintahan yang sebenarnya ikut berkuasa.

Dari pernyataan menurut Robert Dahl dan William Domhoff (1967) dalam Sutoro Eko (2021) mengenai siapa yang menguasai. Memiliki 2 dimensi yang dapat di pahami yaitu pertama menurut Robert Dahl dimensi kewenangan politik, dalam perpolitikan, kekuasaan dan kewenangan memiliki relasi yang sangat lekat. Adapun kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber demi mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan politik, sedangkan kewenangan diartikan sebagai hak, moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dan dimensi yang kedua menurut William Domhoff (1967) yaitu keluar dari institusi pemerintahan maksudnya adalah ada kekuatan di luar institusi pemerintahan yang sebenarnya ikut berkuasa. Seperti kelompok-kelompok elit yang memiliki ruang yang bebas untuk menguasai ruang pemerintahan.

Dengan demikian dari beberapa pendapat para ahli di atas, *governing* adalah sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konsep ini adalah fungsi ekstraksi distribusi, proteksi, dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. Perbuatan memerintah oleh pemerintah mengandung nilai dan tujuan. Ilmu politik banyak berbicara tentang legitimasi. Hukum berbicara tentang legalitas. Ekonomi berbicara tentang efisiensi. Administrasi publik bicara tentang efektivitas. Itu adalah nilai dan tujuan yang dimiliki setiap disiplin ilmu. (Sutoro Eko:2021)

Governing itu merupakan mengatur dan mengurus sesuai dengan konsep *ruling* (menguasai) yang didalam yang berupa proses, fungsi dan hasil. Proses merupakan penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Fungsi merupakan sesuatu yang dilakukan pemerintah bila masyarakat berada dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari kondisi yang kurang baik. Sedangkan hasil adalah akumulasi dari proses dan fungsi yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya *governing* tersebut.

Governing atau biasa disebut perbuatan pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat administrasi negara, melingkupi juga perbuatan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi

negara, misalnya keamanan, peradilan, dan yang lainnya. Perbuatan pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemerintah Desa

a. Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya *Development Community* di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah, tetapi justru sebaliknya, desa merupakan *Independent Community*, yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui

otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Kewenangan Desa

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang harus dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi: a) kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. b) pelaksanaan pembangunan desa. c) pembinaan kemasyarakatan desa. d) pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Dalam pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

c. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa). Mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Saparin, 2009:19). Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut (Nurcholis, 2011:138):

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika atau 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pemerintah desa adalah seorang yang memimpin dan mewakili sebuah masyarakat dengan dibantu perangkat desa yang lain guna untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan desa. Sebagai pemerintah desa sekaligus unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa sudah seharusnya bisa memahami masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat dalam desa tersebut, agar tujuan dalam desa itu dapat dicapai. Karena keberhasilan tujuan desa semuanya tergantung kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

2. *Empowerment* (Pemberdayaan)

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya dengan basis daya mereka sendiri dengan mengoptimalkan daya dan meningkatkan posisi tawar yang dimiliki, baik dibantu maupun tanpa bantuan dari pihak luar.

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah bagian dari konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik. Cirinya terdiri dari *people centered* (berpusat kepada rakyat), *participatory* (partisipasi), *empowering* (memberdayakan masyarakat, dan *sustainable* (berkelanjutan) (Musa, 2017).

Menurut Priyono dan Pranarka (1996) pengertian *empowerment* sejatinya mengandung dua arti, yang pertama *empowerment* memiliki peran sebagai memberi atas kekuasaan atau mampu mengalihkan ke pihak lainnya. Sedangkan kedua dapat dipahami jika arti *empowerment* adalah suatu upaya untuk memberikan keberdayaan dan kemampuan kepada pihak lain.

Pemberdayaan adalah sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 1). Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin

terjadi dengan cara apapun. 2). Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses sosial multidimensi yang membantu orang mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian insentif, motivasi dan hal-hal lain yang dapat memperkuat potensi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih kreatif dan inovatif, sekaligus menjamin kesehatan masyarakat. serta konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat.

3. Kelompok Ternak

Kelompok peternak adalah perkumpulan yang dibuat oleh para peternak disuatu daerah dengan tujuan mensejahterakan anggota kelompoknya maupun masyarakat sekitar. Kelompok ternak merupakan organisasi yang keberadaannya diakui pemerintah melalui dinas peternakan. Kelompok ternak memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sebagai dasar menjalankan organisasinya (Rary AR, 2017).

Menurut (AR, 2017) bahwa terdapat beberapa keuntungan peternak bergabung didalam kelompok ternak yaitu:

1. Peternak lebih mudah mendapatkan modal dengan bunga rendah bahkan modal hibah. Pасalnya, modal usaha peternakan maupun pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan dari pemerintah biasanya disalurkan melalui kelompok ternak.

2. Mempermudah kemitraan dengan Bank, baik perorangan maupun kelompok.
3. Kelompok ternak dapat mengarahkan tata cara peminjaman modal yang baik kepada peternak sehingga peternak dapat memperoleh kredit modal dari bank.
4. Meningkatkan kemampuan teknis beternak dengan lebih cepat dan terarah, karena peternak memperoleh pembinaan atau pelatihan dari peternak lain atau dari dinas peternakan yang memiliki sentra peternakan tertentu di daerahnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tentang Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Ternak Di Kalurahan Baturetno. *Governing* itu merupakan mengatur dan mengurus sesuai dengan konsep *ruling* (menguasai), yang didalam yang berupa proses, fungsi dan hasil. Sehingga yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan di dalam pengelolaan kelompok ternak
2. Fungsi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan di dalam pengelolaan kelompok ternak
3. Hasil Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan di dalam pengelolaan kelompok ternak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Perbuatan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pengelolaan Kelompok Ternak Di Kalurahan Baturetno. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini maka data yang akan di dapatakan adalah data yang utuh dan dapat di kembangkan atau di deskripsikan sehingga hasil dari penelitan ini akan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

2. Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian (Hamidi: 75-76). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang dapat memberikan informasi tentang perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan pengelolaan kelompok ternak di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah

Teknik snowball. Teknik snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Menurut peneliti, obyek penelitian dalam skripsi ini adalah perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan pengelolaan kelompok ternak, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah segala hal yang terkait dengan orang-orang yang memberikan informasi.

Adapun subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 daftar narasumber penelitian

No	Nama	Usia	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	H.Sarjaka	55	DIPOLMA	Lurah
2	Muhammad Lu'ai Arminanto	30	S1	Carik
3	Syamsidin	64	SLTA	Ketua Kelompok Ternak
4	Sopi Aribowo, A.Md	32	S1	Kasi Kesejahteraan
5	Budi	40	STM	Sekretaris 1 Kel Ternak
6	Gito	43	SMA	Dukuh Plakaran
7	Bayu	34	SMK	Buruh
8	Sakiman	58	SMP	Peternak/ Buruh
9	Sugiyono	84	SD	Petani/Peternak

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:34) menyatakan bahwa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial adalah menggunakan metode observasi yaitu metode pengamatan langsung yang teliti. Peneliti

melakukan pengamatan secara langsung tentang kelompok ternak dan bagaimana perbuatan pemerintah desa dalam pemberdayaan pengelolaan kelompok ternak di Kalurahan Baturetno.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan diatas, untuk mengetahui perbuatan pemerintah desa dalam pengelolaan kelompok ternak.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, arsip, rekaman yang ditulis atau informasi dalam bentuk buku, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

d. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2015, hlm 241) mengatakan dalam teknik pengumpuln data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis eksploratif, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang akan diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul semua dan lengkap. Teknik ini digunakan agar data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan penentuan informan. Tahap pengumpulan data ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak digunakan sehingga diperoleh data yang dapat diambil kesimpulan akhirnya dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah peneliti melakukan analisis terhadap penafsiran data yang telah disajikan. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut (Sutopo, 2002:14). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang ditemukan ketika pengumpulan data berikutnya.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BATURETNO

A. Sejarah Kalurahan Baturetno

Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantul. Dimana Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Barat	: Kabupaten Kulon Progo

Kalurahan Baturetno berdiri pada tahun 1946, yang merupakan penggabungan dari 3 Kalurahan Lama (Kalurahan sebelum kemerdekaan) yaitu:

1. Kalurahan Mantup
2. Kalurahan Wiyoro
3. Kalurahan Ngipik

Dari gabungan ketiga Kalurahan Lama tersebut menjadi Kalurahan atau Desa Baturetno, yang berada di Wilayah Kabupaten Kota Gede Yogyakarta.

B. Wilayah Geografis Kalurahan

Luas Wilayah Kalurahan Baturetno : 371.1730 Ha

Batas Wilayah Kalurahan

1. Sebelah Utara : Kalurahan Banguntapan, Bantul
2. Sebelah Selatan : Kalurahan Potorono, Banguntapan Bantul
3. Sebelah Barat : Kalurahan Banguntapan, Bantul
4. Sebelah Timur : Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman

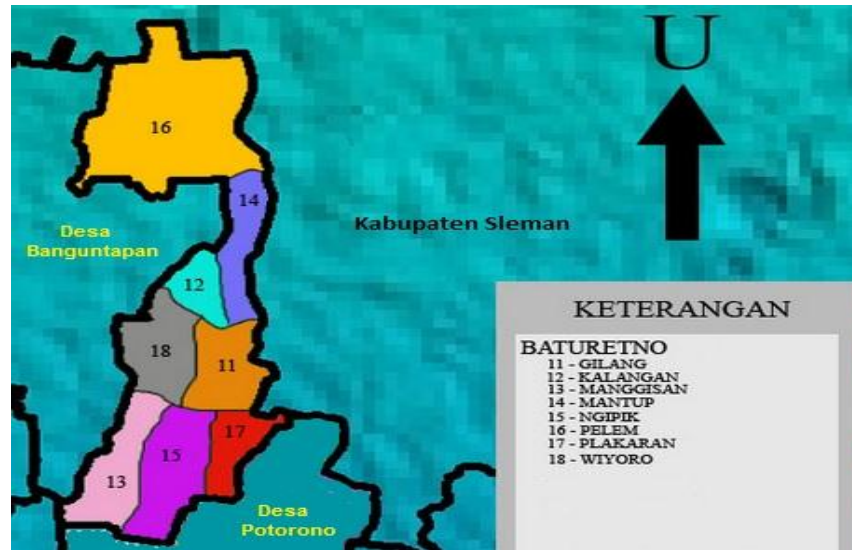
Jarak Orbitrasi (Dari Pusat Pemerintahan Kalurahan)

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 1 Km
2. Jarak Dari Kabupaten Bantul : 19 Km
3. Jarak dari Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta : 28 Km
4. Jarak dari Ibu Kota Negara R.I : 573 Km

Kalurahan Baturetno terdiri dari 8 (delapan) pedukuhan, yaitu :

1. Pedukuhan Pelem :14 RT
2. Pedukuhan Mantup :17 RT
3. Pedukuhan Kalangan :20 RT
4. Pedukuhan Wiroyo :13 RT
5. Pedukuhan Manggisian :8 RT
6. Pedukuhan Ngipik :6 RT
7. Pedukuhan Plakaran :6 RT
8. Pedukuhan Gilang :10 RT

Gambar: 1.1 Peta Baturetno



Sumber: Profil Kalurahan Baturetno 2021

Untuk luas tanah di Kalurahan Baturetno lebih banyak tanah bertekstur lempung berpasir dan lempung berdebu dengan kemiringan 2,62% dan kondisi tanah sedikit bergelombang serta sebagian besar merupakan tanah datar dengan ketinggian tempat berkisar 100-110 m di atas permukaan laut.

Total jumlah penduduk Kalurahan Baturetno berdasarkan pada registrasi penduduk tahun 2021 sebanyak 16.872 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki terdiri dari 8.416 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 8.456 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk seperti yang tertulis di atas, menunjukkan bahwa penduduk menurut jenis perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk menurut jenis kelamin laki-laki.

C. Kondisi Demografis

Dari data monografi kalurahan tahun 2021, jumlah penduduk Kalurahan Baturetno sebesar 16.872 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki 8.416 jiwa.

Sedangkan jumlah perempuan 8.456 jiwa. Berikut merupakan rincian table berdasarkan jumlah penduduk:

1. Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah tabel dari jumlah penduduk di Kalurahan Baturetno berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-laki	8.401	49,7
2	Perempuan	8.488	50,3
Total		16.889	100,00

Sumber: data monografi Kalurahan Baturetno 2021

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Kalurahan Baturetno memiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki perempuan seimbang.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk
		L	(%)	P	(%)	
1	0-12 Bln	83	0,98	82	0,97	165
2	1-9 Thn	1.095	12,99	1.080	12,72	2.175
3	10-19 Thn	1.373	16,29	1.284	15,13	2.657
4	20-29 Thn	1.284	15,23	1.213	14,29	2.497
5	30-39 Thn	1.280	15,18	1.272	14,99	2.552
6	40-49 Thn	1.293	15,34	1.317	15,52	2.610
7	50-59 Thn	1.057	12,54	1.188	14,00	2.245
8	60-69 Thn	694	8,23	725	8,54	1.419
9	70-75 Thn	148	1,76	147	1,73	295
10	Lebih dari 75 Thn	124	1,47	182	2,14	306
Total		8.431	100,00		100,00	8.488

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Islam	15.618	92,47
2	Kristen	733	4,34
3	Katolik	512	3,03
4	Hindu	21	1,12
5	Budha	5	0,03
Jumlah		16.889	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dengan merujuk pada masing-masing kebiasaan hingga perbedaan lingkungan, budaya, agama, pendidikan dan kebutuhan lain-lain, setiap daerah juga pada umumnya mempunyai kegiatan/aktivitas dan pekerjaan yang berbeda-beda. Terkait dengan itu, di Kalurahan Baturetno dapat ditemui beberapa mata pencaharian masyarakat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	124	1,27
2	Pegawai Negeri Sipil	594	6,06
3	Peternak	12	0,12
4	TNI	53	0,54
5	POLRI	51	0,52
6	Karyawan perusahaan swasta	1.623	16,57
7	Wiraswasta	1.182	12,06
8	dll	6.158	62,86
Jumlah		9.797	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

D. Kondisi Sosial

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan atau fasilitas yang memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran suatu proses atau kegiatan masyarakat kalurahan. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Baturetno.

1) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian dan moral manusia untuk menjadi lebih baik, sesuai yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28 c Ayat 1 dan pasal 31 Ayat 1, untuk menunjang dan menindak lanjuti hal tersebut, sarana dan prasarana tentunya sangat diperlukan. Berikut ini sarana dan prasana pendidikan di Kalurahan Baturetno:

Tabel 2.6 Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain	9
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	3
3	Taman Kanak-kanak (TK)	11
4	Sekolah Dasar /MI	6
5	Sekolah Menengah Pertama/MTs	2
6	Sekolah Menengah Atas/SMK/MA	2
7	Institusi/SekolahTinggi/Universitas	1
Jumlah		34

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

2) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dalam menunjang kegiatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi suatu daerah. Dengan kondisi geografis dan demografis

kalurahan yang tergolong padat dan mudah dijangkau, maka sarana kesehatan di Kalurahan Baturetno tergolong lengkap atau dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Prasarana Kesehatan

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	2
3	Apotek	2
4	Poliklinik	2
5	Toko Obat	4
6	Balai Pengobatan	1
Jumlah		12

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

3) Sarana Ibadah

Jumlah sarana peribadatan yang dimiliki oleh Kalurahan Baturetno adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	27
2	Mushola	20
3	Gereja Kristen	3
Jumlah		50

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

4) Sarana Umum

Untuk sarana dan prasarana umum yang ada di Kalurahan Baturetno sudah cukup lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah
1	Olahraga	30
2	Kesenian/Budaya	5
3	Balai Pertemuan	9
4	Pasar	2
5	Lain-lain	15
Jumlah		61

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

5) Sarana Perhubungan

Untuk melakukan kegiatan perekonomian ataupun jenis kegiatan lainnya masyarakat Kalurahan sangatlah memerlukan akses yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Di Kalurahan Baturetno sendiri terdapat beberapa akses yang telah disediakan untuk membantu masyarakat dan dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Prasarana Perhubungan

No	Jenis Prasarana Perhubungan	Jumlah (Km)
1	Jalan Pedukuhan/Lingkungan	13,238
2	Jalan Kalurahan	6,494
3	Jalan Kabupaten	1,702

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

2. Data Aparat Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Baturetno terdiri dari Lurah dan dibantu oleh Pamong Kalurahan. Berikut ini adalah data Pemerintah Kalurahan Banturetno sesuai nama, jabatan, Pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel 2.11 Data Lurah dan Perangkat Kalurahan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	H. Sarjaka	Lurah Baturetno	DIPOLMA	Laki-laki
2	Muhammad Lu'ai Arminanto, S.T	Carik Baturetno	S1	Laki-laki
3	Budiono, S.IP	Kaur Umum	S1	Laki-laki
4	Supardi	Kaur Pemerintahan	SLTA	Laki-laki
5	Sopi Aribowo, A.Md	Kaur Kesra	S1	Laki-laki
6	Deni Dwi Kurniawan, S.Kom	Kaur Pelayanan		Laki-laki
7	Sugiyanti	Kaur Keuangan	SLTA	Perempuan
8	Sumarmanta	Kaur Perencanaan		Perempuan

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

3. Data Pengurus Kelompok Ternak

Tabel 2.12 Pengurus Kelompok Ternak

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Syamsidin	Ketua	SLTA	Laki-laki
2	Ari Slamet	Wakil Ketua	SMP	Laki-laki
3	Budi	Sekretaris 1	STM	Laki-laki
4	Sakiman	Sekretaris 2	SMP	Laki-laki
5	Alip	Bendahara	SMA	Laki-laki
6	Ariyanto	Humas 1	SD	Laki-laki
7	Sulistyanto	Humas 2	SMA	Laki-laki

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan

1. Lurah Baturetno

Tugas:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Melaksanakan pembinaan, kemasyarakatan desa
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa

fungsi:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan, dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Carik Baturetno

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa.
- b. Mengkoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan desa.
- e. Menjalankan administrasi desa.
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa.
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- d. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3. Kaur umum

Tugas

- a. Melakukan urusan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah desa
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa.
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala desa atau carik desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

Fungsi

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat.
- c. Pelaksanaan urusan arsip.
- d. Pelaksanaan urusan ekspedisi.
- e. Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa.

- f. Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
- g. Pelaksanaan urusan penyiapan rapat.
- h. Pelaksanaan urusan pengadministrasian asset.
- i. Pelaksanaan urusan inventarisasi.
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas.
- k. Pelaksanaan urusan pelayanan umum

4. Kaur Pemerintahan

Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan.
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan pembinaan sosial politik.
- e. Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa.
- f. Menyelesaikan perselisihan warga.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

Fungsi

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
- b. Menyusun rancangan regulasi desa.
- c. Pembinaan masalah pertanahan.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan.
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah.

g. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

5. Kaur Kesra

Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.
- b. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa.
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Fungsi

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- b. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi
- c. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

6. Kaur Pelayanan

Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Fungsi

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- c. Pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu.
- d. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

7. Kaur Keuangan

Tugas

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa.

- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin kepala desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa.
- e. Menggali sumber pendapatan desa.
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa atau Carik Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Fungsi

- a. Pengurusan administrasi keuangan.
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Verifikasi administrasi keuangan.
- d. Administrasi penghasilan kepala desa, pamong desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

8. Kaur Perencanaan

Tugas

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala.
- c. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh kepala desa atau carik desa.
- e. Melaksanakan musrenbang desa.
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.
- g. Menyusun rencana kerja pemerintahan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Fungsi

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan.
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan pembinaan sosial politik.
- e. Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa.
- f. Menyelesaikan perselisihan warga.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Sudi Makmur Di Dusun Priangan Desa Karang Anyar Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Bandung : Fokus Media.
- Bayu Surianingrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Cook, Steven, 2007. *Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey*. Baltimore: JHU Press.
- Dahl, Robert, 1961. *Who Governs?: Democracy and power in an American City*, Yale: Yale University Press
- Dahrendoft, R. 1980, "Effectiveness and Legitimacy: On the "Governability" of Democracies", *Political Quarterly*, 51 (4).
- Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010.
- Domhoff, William. 1967. *Who Rules America: Power, Politics, And Social Change*. New York: Prentice-Hall.
- Imam Amanda Permatasari 2021, *Cara Pandang Empowerment Dalam Program Padat Karya Di Dinas Teanga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo*. *Journal Of Governability*, 2(02).
- Kumaat, K., Kaawoan, J., & Lapian, M. (2018). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Peternak Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- M. Silahuddin, *Kewenangan Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Mansbridge, J. (2014). *The role of the state in governing the commons*. *Environmental Science & Policy*, 36, 8-10.
- Nasib, M., Karenina, S., Laela, A., Amrullah, R. A., & Fauzi, M. S. *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Ternak Ngudi Mulyo Panggang oleh PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu*.
- Nopriono, N., & Suswanta, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance* (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan

Periakanaan Kabupaten kulon Progo). *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 21-36.

Nurcholis, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Pelajar.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat*

Sutoro Eko, 2021, *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*

Wade, R., *Governing the Market: Economy theory and the role of Government in East Asian Industrialization*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990).

Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan